

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Ahmad Junaedy Tarigan *

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik, Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis siber dalam kasus pornografi ,bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis siber dalam kasus pornografi

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Analisis putusan pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dalam putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah semua unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Pornografi Media Sosial.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF PORNOGRAPHY VICTIMS IN SOCIAL MEDIA LEGAL PERSPECTIVE NUMBER 19 OF 2016 REGARDING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS Jo. UNOFFICIAL LAW NUMBER 19 of 2016

Ahmad Junaedy Tarigan *

Pornography has a very bad impact on human life, so there must be a concerted effort by the whole society against pornography so that it does not lead to denial of the nature of being human. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law on pornography crime through electronic media, how is the legal protection for victims of cyber-based sexual violence in pornography cases, what are the obstacles and efforts in legal protection for victims of cyber-based sexual violence in pornography cases

The research conducted was normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

*Based on the results of the research it is understood that legal arrangements for the crime of distributing pornographic videos uploaded via social media are included in the Criminal Code and then regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulates pornographic crimes in Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 regarding amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography which is a *lex specialis* (Law that special nature) which regulates pornographic crimes. The judge sentenced the defendant to imprisonment for 12 (twelve) years and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred million rupiah), provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for 6 (six) months. Analysis of the criminal verdict for spreading pornographic videos uploaded via social media in decision No. 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn are all elements in Article 29 of RI Law No. 44 of 2008 concerning Pornography has been fulfilled.*

Keywords: Legal Protection, Victims of Social Media Pornography

** Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra*